



Determinan Transparansi Pelaporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah

Riska, Nina Yusnita Yamin, Jurana*

Universitas Tadulako, Palu

*jurananurdin@gmail.com

Informasi Artikel

Terima 24/03/2022

Revisi 07/08/2022

Disetujui 16/08/2022

DOI:

10.24853/jago.3.1.77-86

Keyword:

External Pressures,

Environmental

Uncertainties,

Management

Commitments,

Implementation of

Transparency,

Financial Reporting.

ABSTRACT

This study aims to analyze the determinants of financial reporting transparency implementation in Regional Apparatus Organizations (RAO). The study employs quantitative approach with population of RAO in Pasangkayu Regency, West Sulawesi; with saturation sampling technique, we explore respondents which are the head of finance and program sub-division. We use multiple linear regression to analyze our data. The results show that external pressure, environmental uncertainty, and management commitment have positive effect on the implementation of financial reporting transparency.

Kata Kunci:

Tekanan Eksternal,

Ketidakpastian

Lingkungan, Komitmen

Manajemen,

Pelaksanaan

Transparansi, Pelaporan

Keuangan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi berupa OPD di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat; menggunakan teknik sampling jenuh dengan responden kepala sub bagian keuangan dan bagian program. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk pemerintah daerah (Pemda), harus memenuhi sifat transparan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian dari aktivitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan atas suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah pada pasal 66 ayat 1, keuangan daerah wajib dikelola secara tertib, sesuai peraturan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memenuhi nilai keadilan, kepatuhan, dan manfaat kepada rakyat. Adanya transparansi dari pemerintah daerah dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas mengenai pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memudahkan rakyat untuk ikut serta dalam pembangunan (Mardiasmo, 2002).

Transparansi, bagi pemerintah daerah, diartikan sebagai keterbukaan informasi dalam mengelola sumber daya publik kepada pihak yang memerlukan informasi dan menjadi bagian pelayanan publik (Tuasikal, 2008). Untuk itu, Pemda wajib menginformasikan kondisi keuangan dan kegiatan lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak berkepentingan. Jika tidak ada transparansi maka akan terjadi penyalahgunaan wewenang, penyimpangan distribusi sumber daya, menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat serta peningkatan tindak korupsi.

Berdasarkan rilis *Corruption Perceptions Index* (CPI), Indonesia menduduki tingkat korupsi pada posisi 96 dari 180 negara dan memperoleh skor 38/100 (<https://sustain.id>, 2022). Ini menjadi bukti bahwa tindakan korupsi di Indonesia masih relatif tinggi dan salah satu faktor yang melatarbelakangi tindakan ini adalah rendahnya pelaksanaan transparansi keuangan pemerintah (Pradita et al., 2019).

Khususnya di Pemerintah Daerah (Pemda), rendahnya transparansi pengelolaan keuangan disebabkan sebagian besar Pemda lebih menitikberatkan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibandingkan kepada masyarakat. Sebagai contoh, adanya dugaan korupsi terstruktur di OPD Sekretariat Dewan Provinsi Sulawesi Selatan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 senilai Rp 20,54 miliar lebih dan tidak kunjung mendapati kejelasan dan keterbukaan informasi kepada rakyat hingga tahun 2021 (Darmansyah, 2021). Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Badan Publik Pemerintah kabupaten/kota dan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2019 dan didapati bahwa sebagian besar belum melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai amanah UU No.14 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (<https://kominfo.sulselprov.go.id>, 2020). Padahal, menurut Mardiasmo (2002), pertanggungjawaban Pemda seharusnya kepada DPRD dan rakyat luas (*dual horizontal accountability*). Namun dalam praktik yang terjadi terdapat informasi yang tidak seimbang mengenai pengelolaan dana sehingga hak rakyat untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan tidak tercapai, khususnya pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Transparansi pelaporan keuangan pada tingkat OPD dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen manajemen. Pertama, tekanan eksternal merupakan tekanan yang timbul dari luar organisasi, seperti regulasi pemerintah untuk mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi dan rakyat untuk mencapai tujuan kehidupan bersama. Riset oleh Ridha & Basuki (2012), Lubis (2017) dan pradita et al. (2019) mendapati bahwa tekanan eksternal mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan transparansi laporan keuangan.

Kedua, ketidakpastian lingkungan merupakan faktor yang membuat suatu OPD mampu menyesuaikan diri atau tidak terhadap beragam perubahan baik dari sisi lingkungan (termasuk teknologi informasi) maupun peraturan sehingga menentukan transparansi pada pelaporan keuangan. Riset Lubis (2017) dan Pradita et al. (2019) mendapati bahwa ketidakpastian lingkungan mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan.

Ketiga, komitmen manajemen merupakan suatu kondisi seseorang yang memihak kepada organisasi, tujuan dan memiliki keinginan untuk mempertahankan keanggotaan organisasi. Komitmen manajemen dapat diartikan loyalitas pada organisasi tempat seseorang bekerja melalui kinerja yang dihasilkan dalam mencapai tujuan organisasi (Robbins & Judge, 2018). Jika pemerintah memiliki komitmen manajemen tentu terjadi transparansi pada pelaporan keuangan. Riset Ridha & Basuki (2012), Dewi et al. (2015) dan Pradita et al. (2019) mendapati bahwa komitmen manajemen mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Pradita et al. (2019) dan bertujuan untuk menganalisis pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen manajemen terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan pada tingkat OPD dengan perbedaan berupa lokasi penelitian yang terletak di Kabupaten Pasangkayu dan periode penelitian pada tahun 2020. Permasalahan yang ada di Kabupaten Pasangkayu adalah transparansi atas informasi dan pelaporan keuangan kepada rakyat yang belum memadai akibat terbatasnya sarana dan media untuk mempublikasi setiap informasi pengelolaan dan pelaporan keuangan.

KAJIAN LITERATUR

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah *agency theory*, dikenalkan oleh Jensen & Meckling (1976) membahas tentang hubungan keagenan antara suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) berupa kontrak kerja sama. Moe (1984) menjelaskan konsep ekonomi organisasi sektor publik dengan menggunakan *agency theory* untuk menilai hubungan pemerintah (*agent*) dengan rakyat (*principal*). Berdasarkan *agency theory* terdapat asimetris informasi antara pemerintah dengan rakyat, khususnya pemerintah daerah. Sebagai konsekuensi, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja mereka sebagai mekanisme *checks and balances* sehingga mampu mengurangi asimetris informasi dan melaksanakan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Tekanan Eksternal

Tekanan eksternal berupa tekanan yang muncul dari luar OPD seperti regulasi, eksekutif, rakyat, dan sebagainya. Setiap jajaran pimpinan organisasi harus senantiasa memperhatikan kekuatan perubahan seperti persaingan, perkembangan teknologi, peraturan perundang undangan dan perkembangan isu-isu global agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan (Chatab, 2009).

Tekanan eksternal memberi pengaruh pada tingkat kapabilitas tata kelola pemerintahan menjadi lebih rendah (Frumkin & Galaskiewicz, 2004), terutama pada pelaksanaan suatu kebijakan (Ridha & Basuki, 2012). Tekanan eksternal dapat membuat pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan OPD terbatas untuk memenuhi formalitas saja demi mendapatkan legitimasi (Ridha & Basuki, 2012).

Ketidakpastian Lingkungan

Ketidakpastian lingkungan ialah rasa ketidakmampuan individu untuk memprediksi sesuatu secara akurat. Ketidakpastian lingkungan yang meningkat akan membuat organisasi cenderung menjadi lebih organik dimana lebih mendentralisasi kewenangan dan tanggung jawab pada tingkat yang lebih rendah (Chatab, 2009). Ketidakpastian lingkungan dalam OPD dapat disebabkan oleh perubahan peraturan, ketidakcocokan antar peraturan, mutasi staf dalam waktu cepat, dan lain-lain sehingga OPD harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang terus mengalami perubahan agar dapat melaksanakan pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan.

Komitmen Manajemen

Komitmen manajemen merupakan integritas manajemen dalam pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan. Komitmen organisasional mencakup kebanggaan, kesetiaan, dan kemauan anggota pada organisasi (Bashaw & Grant, 1994). Robbins & Judge (2018) juga menjelaskan bahwa komitmen organisasional merupakan suatu sikap yang menggambarkan perasaan suka atau tidak suka dari pegawai terhadap organisasi.

HIPOTESIS

Tekanan Eksternal Terhadap Pelaksanaan Transparansi Pelaporan Keuangan

Setyowati (2017) menjelaskan bahwa tekanan eksternal umumnya berupa regulasi, Lembaga Swadaya Rakyat (LSM), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta lembaga formal dan nonformal lain. Berdasarkan *agency theory*, pemerintah (*agent*) dalam menjalankan aktivitas tata kelola pemerintahan dipengaruhi oleh faktor tekanan eksternal baik yang berasal dari tekanan peraturan maupun tekanan sosial dari rakyat (*principal*) sehingga memerlukan transparansi pelaporan keuangan sebagai akuntabilitas publik. Ridha & Basuki (2012), Lubis (2017) dan Pradita et al. (2019) menjelaskan tekanan eksternal mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan transparansi laporan keuangan.

H₁: Tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan.

Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Pelaksanaan Transparansi Pelaporan Keuangan

Setyowati (2017) menjelaskan bahwa ketidakpastian lingkungan terdiri dari perubahan peraturan, dinamika rakyat, dan suatu kegiatan organisasi. Sejalan dengan *agency theory* dimana pemerintah (*agent*) dalam menjalankan aktivitas tata kelola pemerintahan saat ini penuh dengan ketidakpastian lingkungan, sehingga rakyat (*principal*) membutuhkan transparansi pelaporan keuangan untuk mengetahui kinerja dan pengambilan keputusan oleh pemerintah. Lubis (2017) dan Pradita et al. (2019) menjelaskan ketidakpastian lingkungan mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan.

H₂: Ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan.

Komitmen Manajemen terhadap Pelaksanaan Transparansi Pelaporan Keuangan

Hamdi (2017) menjelaskan bahwa komitmen manajemen berhubungan dengan bagaimana cara seseorang mencapai keberhasilan tujuan suatu organisasi melalui mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Sejalan dengan *agency theory* dimana pemerintah (*agent*) dalam menjalankan aktivitas tata kelola pemerintahan harus didukung oleh komitmen manajemen yang utuh, sehingga rakyat (*principal*) membutuhkan transparansi pelaporan keuangan untuk mengetahui kinerja dan pengambilan keputusan oleh pemerintah untuk menilai komitmen manajemen pemerintah yang dituangkan dalam kebijakan publik. Ridha & Basuki (2012), Dewi et al. (2015) dan Pradita et al. (2019) mendapati bahwa komitmen manajemen mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan.

H₃: Komitmen Manajemen berpengaruh positif terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Populasi berupa OPD di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yang berjumlah sebanyak 36 OPD. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah teknik sampling jenuh dengan responden yang dijadikan sampel adalah kepala sub bagian keuangan dan kepala sub bagian program. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis, yang bersumber dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan memberi kuesioner kepada responden. Adapun operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala pengukuran
Tekanan Eksternal (X ₁)	a. Terbit regulasi berupa UU dan peraturan tentang transparansi b. Desakan pihak terkait untuk meningkatkan transparansi pelaporan keuangan c. Meningkatnya kritik dari rakyat dan perhatian dari LSM terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan	Ordinal
Ketidakpastian Lingkungan (X ₂)	a. OPD memiliki hubungan stabil dengan lingkungan sekitar b. OPD memperbaiki legitimasi untuk mendapat dukungan rakyat c. Terdapat informasi keuangan berdampak positif bagi OPD d. Pelaksanaan transparansi dalam OPD	Ordinal

Lanjutan Tabel 1

Variabel	Indikator	Skala pengukuran
Komitmen Manajemen (X_3)	a. Keinginan pegawai b. Loyalitas pegawai c. Kebanggaan karyawan pada organisasi atau lembaga tempat ia bekerja	Ordinal
Transparansi Pelaporan Keuangan (Y)	a. Tersedia informasi tentang kesuksesan dan ketidaksiuksesan pencapaian laporan keuangan OPD b. Tersedia informasi dan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu dan terbuka. c. Tersedia akses kepada pemangku kepentingan atas laporan keuangan	Ordinal

Metode analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda yang terdiri dari beberapa tahap pengujian, yaitu: uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji korefisien determinasi, uji analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Alat analisis data yang digunakan adalah SPSS Versi 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, setiap butir pernyataan dari indikator variabel telah terpenuhi sehingga dapat diuji lebih lanjut. Selanjutnya, hasil uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi juga telah terpenuhi sehingga dapat dilanjutkan dengan uji analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 2 menyajikan hasil uji koefisien determinasi yang memperlihatkan pengaruh tekanan eksternal (X_1), ketidakpastian lingkungan (X_2), komitmen manajemen (X_3) terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan (Y) sebesar 28,9% (*Adjusted R Square*) sedangkan sisanya sebesar 71,1% ditentukan oleh variabel lain.

Tabel 2

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Model Summary ^b	
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,590 ^a	.348	.289	3,56833

a. Dependent Variabel: PTPK_Y

b. Predictor: (Constant), TE_X1, KL_X2, KM_X3

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 3 adalah hasil uji hipotesis secara simultan (uji F) untuk menentukan kelayakan model regresi. Berdasarkan hasil uji F (Tabel 3) didapati bahwa nilai f-hitung > f-tabel ($4,916 > 2,63$) dan memiliki nilai sig. sebesar $0,006 < 0,05$. Hasil ini menandakan bahwa tekanan eksternal (X_1), ketidakpastian lingkungan (X_2), komitmen manajemen (X_3) memiliki pengaruh secara simultan terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan (Y) sehingga model dinyatakan layak untuk dilakukan pengujian hipotesis secara parsial.

Tabel 3
Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	179,425	3	59,808	4,916	,006 ^b
	Residual	401,448	33	12,165		
	Total	580,873	36			

c. Dependent Variabel: PTPK_Y

d. Predictor: (Constant), TE_X1, KL_X2, KM_X3

Hasil uji hipotesis secara parsial dinilai berdasarkan hasil t hitung dan nilai signifikansi yang diperoleh, jika nilai t hitung > t tabel dan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya. Hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) tersaji dalam Tabel 4. Hasil pada Tabel 4 juga dijadikan sebagai dasar dalam membentuk persamaan:

$$Y = 4,380 + 0,227X_1 + 0,288X_2 + 0,338X_3$$

Tabel 4
Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,380	6,892		0,838	0,529
	TE_X1	0,275	0,209	0,227	2,319	0,020
	KL_X2	0,372	0,213	0,288	2,747	0,009
	KM_X3	0,485	0,271	0,338	2,228	0,033

a. Dependent Variable : PTPK_Y

Pembahasan

Tekanan Eksternal Terhadap Pelaksanaan Transparansi Pelaporan Keuangan

Tekanan eksternal (X_1) memperoleh nilai t-hitung > t-tabel ($2,319 > 1,687$) dan tingkat sig. < taraf nyata ($0,020 < 0,05$) (Lihat Tabel 4). Ini diartikan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan. Artinya, tekanan eksternal yang tinggi akan meningkatkan pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan. Hasil ini diperoleh dari tanggapan responden yang menyatakan terdapat tuntutan kepada pemerintah untuk menerapkan transparansi pelaporan keuangan melalui undang-undang dan peraturan tentang transparansi, meningkatnya kritik dari rakyat dan perhatian dari LSM terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan *agency theory* dimana pemerintah (*agent*) dalam menjalankan aktivitas tata kelola pemerintahan dipengaruhi oleh faktor tekanan eksternal baik yang berasal dari tekanan peraturan maupun tekanan sosial dari rakyat (*principal*) sehingga memerlukan transparansi pelaporan keuangan sebagai akuntabilitas publik. Hasil ini mendukung temuan Ridha & Basuki (2012), Lubis (2017) dan Pradita et al. (2019) mendapati bahwa tekanan eksternal mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan transparansi laporan keuangan.

Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Pelaksanaan Transparansi Pelaporan Keuangan

Ketidakpastian lingkungan (X_2) memperoleh nilai t -hitung $>$ t -tabel ($2,747 > 1,687$) dan tingkat sig. $<$ taraf nyata ($0,009 < 0,05$) (Lihat Tabel 4). Ini diartikan bahwa ketidakpastian lingkungan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan. Ini menandakan bahwa ketidakpastian lingkungan yang tinggi akan meningkatkan pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan. Hal ini sesuai dengan tanggapan responden bahwa dalam memperbaiki legitimasi OPD perlu mendapatkan dukungan dari rakyat dan memperbaiki suatu hubungan sosial antara pemerintah dan rakyat akibat ketidakpastian lingkungan. Hal ini sejalan dengan *agency theory* dimana pemerintah (*agent*) dalam menjalankan aktivitas tata kelola pemerintahan saat ini penuh dengan ketidakpastian lingkungan, sehingga rakyat (*principal*) membutuhkan transparansi pelaporan keuangan untuk mengetahui kinerja dan pengambilan keputusan oleh pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian Lubis (2017) dan Pradita et al. (2019) mendapati bahwa ketidakpastian lingkungan mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan.

Komitmen Manajemen Terhadap Pelaksanaan Transparansi Pelaporan Keuangan

Komitmen Manajemen (X_3) memperoleh nilai t -hitung $>$ t -tabel ($2,226 > 1,687$) dan tingkat sig. $<$ taraf nyata ($0,033 < 0,05$) (Lihat Tabel 4). Ini diartikan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan. Ini menandakan bahwa komitmen manajemen yang tinggi akan meningkatkan pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan. Komitmen manajemen tentang perlunya pendidikan yang berkelanjutan dalam internal OPD untuk menghadapi perubahan lingkungan yang semakin kompleks. Hal ini sesuai tanggapan responden bahwa perlunya pendidikan yang berkelanjutan agar pegawai tetap komitmen di tempat dia bekerja dan siap dalam menghadapi perubahan lingkungan yang ada. Sejalan dengan *agency theory* dimana pemerintah (*agent*) dalam menjalankan aktivitas tata kelola pemerintahan harus didukung oleh komitmen manajemen yang utuh, sehingga rakyat (*principal*) membutuhkan transparansi pelaporan keuangan untuk mengetahui kinerja dan pengambilan keputusan oleh pemerintah untuk menilai komitmen manajemen pemerintah yang dituangkan dalam kebijakan publik (Ridha & Basuki, 2012; Dewi et al., 2015; Pradita et al.; 2019).

KESIMPULAN

Tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen manajemen baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan. Pertama, tekanan eksternal yang muncul dari luar OPD seperti tuntutan regulasi dan pihak berkepentingan menjadi pendorong untuk melakukan transparansi pelaporan keuangan. Kedua, faktor ketidakpastian lingkungan menjadi hal yang penting dalam transparansi pelaporan keuangan, karena adanya persaingan untuk mendapatkan pengakuan dari rakyat untuk OPD yang dimana para pegawai yang didalamnya harus menunjukkan hal terbaik yang ada di OPD tempat dia bekerja. Ketiga, adanya komitmen organisasi yang tinggi menjadikan seseorang peduli akan nasib organisasi dan berusaha menjadikan organisasi menuju lebih baik. Implikasi riset ini

adalah peningkatan transparansi pelaporan keuangan pada tingkat pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen manajemen sehingga masing-masing daerah dapat membuka diri untuk mendengar aspirasi rakyat, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan meningkatkan kemampuan baik secara teoritis maupun praktis agar terbentuk komitmen manajemen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Keterbatasan penelitian adalah jumlah sampel penelitian yang relatif sedikit karena menyesuaikan dengan jumlah OPD di Kabupaten Pasangkayu dan variabel independen yang dianalisis terbatas pada tekanan eksternal (X_1), ketidakpastian lingkungan (X_2) dan komitmen manajemen (X_3) sebagai determinan pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan (Y). Oleh karena itu, Saran kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada Kabupaten lain yang lebih besar dan menambahkan variabel lain terkait determinan pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan seperti faktor politik dan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bashaw, R., & Grant, E. S. (1994). Exploring the distinctive nature of work commitments: Their relationship with personal characteristics, job performance, and propensity to leave. *Journal of Personal Selling and Sales Management*, 14(2), 41 – 56.
- Chatab, N. (2009). *Mengawal Pilihan Rancangan Organisasi*. Bandung: Alfabeta
- Darmansyah. (2021). Polisi Diminta Serius Usut Kasus Dugaan Korupsi Di Sulsel. Diakses melalui <https://nusantara.rmol.id/read/2021/03/04/477431/polisi-diminta-serius-usut-kasus-dugaan-korupsi-di-sulsel>
- Dewi, N. W. S., Sujana, E., & Sinarwati, N. K. (2015). Pengaruh Tekanan Eksternal, Faktor Politik, dan Komitmen Manajemen Terhadap Pelaksanaan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Karangasem). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1).
- Hamdi, F. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pelaksanaan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 3514-3528.
- <https://kominfo.sulselprov.go.id>. (2020). Sekprov Sebut Keterbukaan informasi Badan Publik Upaya Mencegah Korupsi. Diakses melalui <https://kominfo.sulselprov.go.id/post/sekprov-sebut-keterbukaan-informasi-badan-publik-upaya-mencegah-korupsi>
- <https://sustain.id>. (2022). Naik 1, Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia Tahun 2021 Masih Dibawah Rata-rata. Diakses melalui <https://sustain.id/2022/02/03/naik-1-skor-indeks-persepsi-korupsi-cpi-indonesia-tahun-2021-masih-dibawah-rata-rata/>
- Lubis, N. K. (2017). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian, Lingkungan dan Komitmen Manajemen terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi)*, 1(1), 62-71.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah . *Jurnal Ekonomi Rakyat*.
- Moe , T. M. (1984) . The new economics of organizations. *American Journal of political science*, 28(5), 739-777.
- Pemerintah Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah Telah Memberikan Hak, Wewenang, Dan Kewajiban Daerah Otonom. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Pemerintah Indonesia. (2004). Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pradita, K. D., Hartono, A., & Mustofa, A. F. (2019). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen Terhadap Pelaksanaan Transparansi Pelaporan Keuangan. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 87–100.
- Ridha, M. A., & Basuki, H. (2012). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Pelaksanaan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2).
- Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2018). *Organizational behavior. (18th Edition)*. England: Pearson Education.
- Setyowati, D. F. (2017). Pengaruh Tekanan Eksternal, Sumber Daya Manusia, Komitmen Manajemen, dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Pelaksanaan Transparansi Pelaporan Keuangan. Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Tuasikal, A. (2008). Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. *Finance and Banking Journal*, 10(1), 66-88.